

# PENGAMBILAN KEPUTUSAN & ANALISIS KEBIJAKAN SEKTOR PENDIDIKAN

TEORI &  
PRAKTIK

Prof. Dr. Endang Komara, M.Si.  
Dr. Hendi Suhendraya, M.Pd.



**COPYRIGHT 2024<sup>©</sup>**

# **PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN ANALISIS KEBIJAKAN SEKTOR**

## **Penulis**

Prof. Dr. Endang Komara, M.Si. dkk.

## **Editor**

Nazzyallah, S.Pd.

## **Desain Sampul**

Anshori Daulatul Islam

**ISBN : 978-623-10-1691-1**

Penerbit:

**Penerbit Filomedia Pustaka**

Redaksi:

Jl. KH. Ruhiat

Kelurahan Cipakat, Kecamatan Singaparna,

Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat

No. Hp: 0895406105129

Email: [filomediapublisher@gmail.com](mailto:filomediapublisher@gmail.com)

Website: [filomediapublisher.my.id](http://filomediapublisher.my.id)

Hak Cipta 2024 @ Penerbit Filomedia Pustaka

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak Sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit atau Penulis

## *TIM PENULIS*

Endang Komara | Hendi Suhendraya Muchtar  
Alien Silviani | Yana Maulana | Indra Suryana | Jelita Dewanty Hendarsyah  
Susan Marisan | Maryam | Siti Robiah | Andini Anggraeni Kusnadi  
Anshori Daulatul Islam | Iis Kusmiati | Lilis Widiawati | Premeilani  
Nenden Noer Kusmawati | Nia Zulfa Septia Noer | Abdul Rahman  
Andi Suhandi | Agus Wahyu | Haldi Rizkiawan Sukarna | Ferry Wibowo  
Nesa Halimah Adzania | Siti Fatimah | Ferry Timorochmadi | M.Y. Fakhruhin  
Wandani | Neni Sri Rahayu | Yeti Nurhayati | Hari Suprayoga | Lina Dalina  
Novalia Nurlaela | Rianti Garvita Sari | Khamisah Nurdini  
Moh Idris Wikarso | Rina Widyastuti | Nur Indah Juniati

## ***KATA PENGANTAR***

*Alhamdulillahirabbilalamin*, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas langit dan bumi yang telah memberikan ilmunya kepada seluruh manusia dan khususnya kepada kami sehingga bisa menyelesaikan buku yang berjudul “Pengambilan Keputusan dan Analisis Kebijakan Sektor Pendidikan”. Sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi contoh terbaik bagi manusia dalam mengimplementasikan ilmu-ilmu yang telah diberikan Allah kepadanya untuk mengajarkan manusia sehingga terbentuk peradaban Islam yang menjadi *rahmatan lil ‘alamiin*.

Dengan rasa syukur yang mendalam kami mempersembahkan buku ini sebagai sumbangsih kepada dunia pendidikan yang terus berkembang dan memerlukan referensi, khususnya berkenaan dengan kajian tentang kebijakan-kebijakan dalam sektor pendidikan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku ini. Kami pun menyadari dalam penulisan buku ini tentu terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan-kekurangan yang ada dan kami pun memohon kritik dan saran untuk perbaikan dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkenaan dengan pengambilan keputusan dan analisis kebijakan di sektor pendidikan.

Bandung, Juni 2024

Penulis

## ***DAFTAR ISI***

KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
BAB 2 KONSEP PENDIDIKAN .....	10
A. Pengertian Pendidikan .....	10
B. Tujuan dan Fungsi Pendidikan .....	10
C. Teori Pendidikan.....	12
BAB 3 RELASI PENDIDIKAN DENGAN DIMENSI POLITIK, EKONOMI, DAN SOSIAL.....	14
A. Realisasi Pendidikan dengan Dimensi Politik.....	14
B. Realisasi Pendidikan dengan Dimensi Ekonomi .....	17
C. Realisasi Pendidikan dengan Dimensi Sosial .....	21
BAB 4 KONSEP DASAR KEBIJAKAN PENDIDIKAN .....	26
A. Pengerian Kebijakan Pendidikan.....	26
B. Fungsi dan Jenjang Kebijakan Pendidikan .....	28
C. Pendekatan dan Model Kebijakan Pendidikan .....	32
BAB 5 TAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN.....	37
A. Tahapan Kebijakan Pendidikan .....	37
B. Formulasi Kebijakan Pendidikan.....	39
C. Legitimasi Kebijakan Pendidikan.....	46
D. Evaluasi Kebijakan Pendidikan .....	53
BAB 6 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI TINGKAT MAKRO .....	61
BAB 7 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI TINGKAT MESSO.....	75
BAB 8 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI TINGKAT MIKRO.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	85



# ***BAB 1***

## ***PENDAHULUAN***

Pendidikan berperan sangat penting dalam pembentukan karakter, pengetahuan, dan keterampilan individu yang pada akhirnya berdampak pada berbagai aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, dan sosial. Secara historis pendidikan telah diakui sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat (Imron, 2020). Namun hubungan antara pendidikan dengan dimensi politik, ekonomi, dan sosial ini sangat kompleks dan dinamis, dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal.

Pendidikan dalam konteks politik sering dianggap sebagai sarana untuk mempromosikan stabilitas dan demokrasi. Negara-negara dengan tingkat pendidikan yang tinggi biasanya memiliki partisipasi politik yang lebih besar. Ini disebabkan oleh peningkatan kemampuan individu untuk berpikir kritis, memahami isu-isu politik, dan membuat keputusan yang lebih baik dalam demokrasi. Selain itu pendidikan juga dapat menyebarkan nilai-nilai demokratis seperti toleransi, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Sebagai contoh penelitian oleh Murtasidin (Murtasidin & Sigalingging, 2020) menunjukkan adanya korelasi positif antara tingkat pendidikan dan stabilitas politik serta kualitas demokrasi di suatu negara.

Pada dimensi ekonomi pendidikan dianggap sebagai investasi yang menghasilkan capital manusia. Teori modal manusia yang dikemukakan oleh Siswanto (Siswanto & Hidayati, 2021) menyatakan bahwa pendidikan meningkatkan produktivitas individu dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pendidikan memberikan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja yang semakin kompleks dan global.

Sebagai contoh studi yang dilakukan oleh Tohani (Tohani, 2020) menemukan bahwa setiap tambahan satu tahun pendidikan meningkatkan pendapatan individu sebesar 10% di negara berkembang dan 7% di negara maju.

Selain itu pendidikan juga berdampak pada aspek sosial dengan mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi serta meningkatkan mobilitas sosial. Pendidikan membuka peluang lebih besar bagi individu dari latar belakang kurang beruntung untuk meningkatkan status sosial dan ekonominya. Sebagai alat pemberdayaan sosial pendidikan berperan dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup. Penelitian oleh *UNESCO* (2014) menunjukkan bahwa perempuan yang berpendidikan cenderung memiliki kesehatan yang lebih baik, menikah di usia lebih dewasa, serta memiliki anak-anak yang lebih sehat dan terdidik.

Meskipun banyak bukti yang menunjukkan manfaat pendidikan, masih terdapat tantangan signifikan dalam memastikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi semua lapisan masyarakat. Ketidaksetaraan dalam pendidikan masih menjadi masalah utama di banyak negara, terutama di negara berkembang. Faktor-faktor seperti kemiskinan, gender, etnis, dan geografi sering kali menjadi penghalang bagi akses pendidikan yang adil dan berkualitas. Misalnya, laporan *World Bank* (2018) menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga miskin di pedesaan memiliki kemungkinan yang jauh lebih kecil untuk menyelesaikan pendidikan dasar dibandingkan dengan anak-anak dari keluarga kaya di perkotaan.

Pendidikan juga menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan cepat dalam teknologi dan ekonomi global. Kurikulum dan metode pengajaran sering kali tertinggal dari kebutuhan pasar tenaga kerja yang dinamis. Hal ini menimbulkan masalah ketidaksesuaian antara keterampilan yang diajarkan di sekolah dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri. Sebagai contoh, laporan *World Economic Forum* (2020) menyoroti bahwa

lebih dari separuh pekerjaan yang ada saat ini akan memerlukan keterampilan baru yang belum diajarkan di banyak sistem pendidikan saat ini.

Dengan demikian, penting untuk terus mengkaji dan memperbaiki sistem pendidikan agar dapat memenuhi kebutuhan politik, ekonomi, dan sosial yang terus berkembang. Ini mencakup upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, memperbarui kurikulum dan metode pengajaran, serta memastikan bahwa pendidikan dapat berfungsi sebagai alat untuk memberdayakan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Sistem pendidikan yang kuat dan inklusif tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan individu tetapi juga akan memperkuat struktur politik, ekonomi, dan sosial suatu negara. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut dan kebijakan yang komprehensif diperlukan untuk mengatasi tantangan ini dan memaksimalkan potensi pendidikan sebagai pendorong utama pembangunan berkelanjutan.

Dalam UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), dinyatakan bahwa ada tiga tantangan besar dalam bidang pendidikan di Indonesia, yaitu (1) mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai; (2) mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan mampu bersaing dalam pasar kerja global; dan (3) sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah sistem pendidikan nasional dituntut untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman, memperhatikan kebutuhan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.

Selaras dengan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJPM) 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Hal utama dari strategi yang dituangkan oleh presiden yaitu tentang

pembangunan sumber daya manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai IPTEK didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

Di Era 5.0 masyarakat dituntut memiliki kemampuan untuk menyelesaikan berbagai tantangan dan masalah sosial yang semakin kompleks dan menyeluruh. Karena itu pendidikan harus menjadi pusat perubahan bersama masyarakat untuk menciptakan komunitas pembelajaran dan mendorong pembelajaran yang menggunakan berbagai sumber belajar melalui platform teknologi dan informasi, serta mengembangkan kurikulum dengan menggunakan sumber daya yang tersedia.

Sesuai dengan tujuan Undang-Undang Dasar 1945 kebijakan pendidikan membantu penyelenggara pendidikan memahami masalah tersebut dan memberikan payung hukum bagi mereka. Kebijakan pendidikan juga berfungsi sebagai payung hukum bagi seluruh penyelenggara pendidikan dalam upaya mereka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kebijakan pendidikan memainkan peran penting dalam menetapkan garis besar dan standar penyelenggaraan pendidikan nasional. Institusi pendidikan di seluruh negara tidak akan bergantung pada kebijakan yang ditetapkan oleh kementerian.

Dalam kehidupan pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia baik dari kalangan anak-anak, remaja, maupun dewasa, sebab pendidikan merupakan tolok ukur yang akan membawa manusia ke arah masa depan. Dengan adanya pendidikan itu sendiri kita dapat mengetahui kepentingan dalam perkembangan pada diri manusia yang meliputi tingkah laku, sifat, sikap, watak, yang semua itu akan sangat mempengaruhi dan berdampak pada diri manusia, serta bangsa dan negara. Hal tersebut membuktikan bahwa negara sangat membutuhkan manusia-manusia atau orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi agar dapat mencetak generasi

yang selalu berfikir dan bekerja cerdas, cermat dan tuntas, memiliki pola pikir yang logis, kritis, kreatif dan inovatif juga orang-orang yang memiliki karakter, semangat, berbudi luhur, sopan santun, dan sifat antusias yang tinggi.

Dalam dunia pendidikan setiap negara memiliki visi misi serta tujuan masing-masing di mana kedua harapan tersebut akan dapat berjalan dengan baik manakala setiap perwujudan diselenggarakan sesuai sistem ataupun aturan pendidikan dengan baik sehingga akan berpengaruh pada peserta didik yang memiliki jiwa memajukan bangsa, baik dari segi karakter ataupun kecerdasan yang akan menciptakan bangsa yang mampu bersaing. Oleh sebab itu potret pendidikan itu sendiri tidak lain di bawah tanggung jawab suatu negara di mana aturan yang berkenaan dengan pendidikan diatur dalam kebijakan pendidikan, salah satunya adalah kebijakan pengembangan profesional guru karena guru merupakan tolok ukur utama dalam mencetak generasinya.

Kebijakan pendidikan itu merupakan keputusan dan tindakan guna mengatur kepentingan publik, yaitu penduduk, masyarakat dan warga negara. Menurut Kamars (2017: 63), kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik yaitu sebuah aturan dan juga keputusan yang dibuat oleh pihak tertentu (pemerintah) berdasarkan beberapa pertimbangan guna mengatur atau mengelola Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM), demi kepentingan umum, masyarakat, penduduk, dan pihak-pihak yang terlibat agar diperoleh hasil yang optimal.

Menurut Supardi (2015:117), kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di negara Indonesia ini meliputi setidaknya empat perkara yakni kurikulum, tenaga pendidik, sarana pendidikan, dan kepemimpinan satuan pendidikan. Merujuk pada kebijakan di atas Indonesia memiliki aturan atau kebijakan dan sistem yang baik namun dapat kita lihat masih terdapat guru yang kurang maksimal dari segi mendidik, pengembangan

guru yang kurang memuaskan, dan sebagainya yang memberikan dampak negatif pada peserta didik. Hal tersebut akan sangat mempengaruhi pada sumber daya manusia di negara ini terlebih pada kualitas daya saing serta untuk menguasai ranah pikir kecerdasan intelektual yang tinggi dan juga model pendidikan.

Selain itu menurut Rusdiana (2015:17), potret pembangunan pendidikan Indonesia sampai saat ini belum menggembirakan. Hal tersebut disebabkan adanya problem kebijakan yang terkait dengan tiga persoalan mendasar dalam kebijakan pendidikan. Pertama, pola perumusan kebijakan pendidikan masih berpusat pada elit kekuasaan dengan system *top-down* pada satu sisi sedangkan partisipasi masyarakat relatif masih minimal. Pada sisi lain, meskipun saat ini kita sudah memasuki era otonomi daerah, praktik dengan kultur birokrasi politik lama masih tetap mengemuka. Kedua, banyaknya rumusan kebijakan pendidikan yang dirancang secara rumit dan mahal tetapi pada tataran implementasi mengalami distorsi dan banyak penyimpangan. Ketiga, berbagai paket kebijakan tentang inovasi pendidikan hamper selalu dilakukan dengan serba cepat (instan) dan kurang mempertimbangkan berbagai implikasi secara matang.

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa sebab untuk menjadi bangsa yang maju merupakan suatu cita-cita yang diharapkan pada suatu negara. Biasanya kualitas kecerdasan manusia dilihat dari seberapa tinggi seseorang tersebut mengenyam pendidikan. Tidak hanya itu dengan adanya pendidikan manusia juga dapat mencapai pemenuhan kebutuhan hidupnya dengan cara bekerja. Bukan hal yang istimewa lagi jika banyak orang berlomba lomba untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya.

Pemerintah juga tidak main-main dalam menggalakkan pendidikan. Terbukti dari adanya salah satu peraturan yang mengatur tentang pendidikan.

Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.

Hal yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pemerintah memberikan petunjuk bahwa pemerintah mendapatkan amanat untuk menjamin hak-hak warga negara dalam mendapatkan layanan pendidikan. Selain itu pemerintah juga berkewajiban untuk menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional. Kepedulian pemerintah akan pendidikan juga terlihat pada besarnya alokasi dana untuk pendidikan dari APBN. Ini membuktikan keseriusan pemerintah untuk menjamin tiap-tiap warga negaranya agar mendapatkan pendidikan yang layak namun yang dijelaskan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai kesejahteraan dalam pendidikan hal ini tidak disadari betul oleh masyarakat sebab masih banyak masyarakat yang menganggap pendidikan bukan hal yang utama dalam mencapai kesejahteraan hidup.

Selain itu pemerintah juga tidak mengawasi betul pengalokasian dana tersebut sebab sebagian masyarakat yang menyadari akan pentingnya pendidikan masih sulit dalam mengenyam pendidikan. Pendidikan masih terasa sangat mahal bagi sebagian masyarakat yang garis kehidupannya masih rata-rata dibawah garis kemiskinan. Masih ada ketimpangan antara sesama warga negara dalam mengenyam pendidikan. Untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang baikdirasakan sangat mahal bagi sebagian masyarakat. Apalagi saat ini pemerintah mewajibkan wajib belajar 12 tahun. Hal ini juga yang menjadi kecemasan bagi masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya walau dengan harga yang sangat mahal. Inilah yang menjadi perhatian masyarakat di mana seharusnya pemerintah mengadakan pemerataan terhadap pendidikan. Pengalokasian dana harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat demi tercapainya pendidikan yang memadai. Seharusnya pendidikan bukan hal yang sulit untuk di dapat di tengah era

reformasi seperti ini. Namun pada faktanya, fenomena yang tampak di tengah-tengah masyarakat adalah masih rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia.

Pengambilan keputusan dan analisis kebijakan dalam sektor pendidikan adalah aspek yang sangat penting dalam upaya untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan di berbagai tingkat. Keputusan yang diambil dalam sektor ini tidak hanya mempengaruhi lembaga pendidikan, guru, dan siswa, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang pada pembangunan ekonomi, sosial, dan politik suatu negara. Oleh karena itu pendekatan yang sistematis dan berbasis data sangat diperlukan dalam merumuskan kebijakan pendidikan.

Dalam proses pengambilan keputusan para pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan berbagai faktor termasuk kebutuhan lokal, kondisi ekonomi, dan tren global dalam pendidikan. Mereka harus mampu mengidentifikasi masalah utama, merancang solusi yang efektif, serta mengevaluasi dampak dari kebijakan yang diterapkan. Proses ini sering melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi non-pemerintah, komunitas, dan sektor swasta.

Analisis kebijakan pendidikan melibatkan pengumpulan dan pengolahan data untuk memahami efektivitas kebijakan yang ada dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Metode analisis yang digunakan bisa berupa analisis kuantitatif seperti statistik pendidikan serta analisis kualitatif seperti studi kasus dan wawancara mendalam. Tujuan utama dari analisis kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya tepat sasaran tetapi juga berkelanjutan dan inklusif.

Pendekatan yang berbasis bukti dalam pengambilan keputusan dan analisis kebijakan pendidikan memungkinkan para pembuat kebijakan untuk merancang intervensi yang lebih efektif dan responsif terhadap perubahan dinamika sosial dan ekonomi. Dengan demikian upaya untuk meningkatkan

sistem pendidikan dapat berjalan lebih efisien dan menghasilkan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan.

## ***BAB 2*** ***KONSEP PENDIDIKAN***

### **A. Pengertian Pendidikan**

Pendidikan merupakan proses yang terorganisir dan sistematis dalam mentransfer pengetahuan, keterampilan, nilai, dan norma dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pendidikan tidak hanya terjadi dalam konteks formal seperti sekolah dan universitas tetapi juga dalam konteks informal seperti keluarga, komunitas, dan lingkungan kerja. Menurut definisi yang lebih luas pendidikan mencakup seluruh pengalaman yang berdampak pada perkembangan individu, baik secara intelektual, emosional, sosial, maupun moral.

Menurut UNESCO (2020), pendidikan adalah proses yang memungkinkan individu untuk mengembangkan potensi mereka secara penuh, memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam masyarakat, dan mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik. Dalam pandangan ini pendidikan tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik tetapi juga pada pengembangan karakter dan kemampuan sosial.

### **B. Tujuan dan Fungsi Pendidikan**

Tujuan pendidikan dapat bervariasi tergantung pada konteks budaya, sosial, dan politik. Namun, secara umum tujuan pendidikan dapat dikategorikan sebagai berikut:

#### **1. Pengembangan Individu**

Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi dan bakat individu, baik secara intelektual, emosional, maupun fisik. Hal ini

mencakup pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan.

## 2. Pembentukan Karakter

Pendidikan berperan dalam membentuk karakter individu, termasuk nilai-nilai moral, etika, dan sosial. Pendidikan bertujuan untuk menghasilkan individu yang memiliki integritas, tanggung jawab, dan empati terhadap orang lain.

## 3. Partisipasi Sosial dan Politik

Salah satu tujuan pendidikan adalah mempersiapkan individu untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial dan politik. Pendidikan mengajarkan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan kewarganegaraan yang baik.

## 4. Pembangunan Ekonomi

Pendidikan memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja. Pendidikan berfungsi sebagai investasi dalam modal manusia yang dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi.

## 5. Kesetaraan dan Inklusi Sosial

Pendidikan bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya mereka.

Fungsi pendidikan mencakup berbagai aspek yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Menurut Emile Durkheim, pendidikan berfungsi sebagai alat untuk mentransmisikan norma dan nilai budaya kepada generasi muda sehingga memperkuat kohesi sosial dan stabilitas masyarakat. Selain itu pendidikan juga berfungsi sebagai mekanisme

seleksi dan distribusi tenaga kerja, membantu individu untuk menemukan peran dan posisi yang sesuai dalam struktur ekonomi dan sosial.

### **C. Teori Pendidikan**

Berbagai teori pendidikan telah dikembangkan untuk memahami proses dan hasil pendidikan. Beberapa teori utama yang sering digunakan dalam studi pendidikan meliputi:

#### 1. Teori Behaviorisme

Teori ini berfokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari pembelajaran. Tokoh utama dalam teori ini adalah B.F. Skinner yang mengemukakan konsep pengkondisian operan di mana perilaku diatur oleh konsekuensi yang mengikuti. Pendidikan menurut teori ini harus dirancang untuk memperkuat perilaku positif melalui penguatan dan hukuman.

#### 2. Teori Kognitivisme

Teori ini menekankan pentingnya proses mental dalam pembelajaran, seperti berpikir, mengingat, dan memecahkan masalah. Jean Piaget adalah salah satu tokoh utama yang mengembangkan teori perkembangan kognitif yang menjelaskan bagaimana anak-anak berpikir dan belajar pada berbagai tahap perkembangan.

#### 3. Teori Konstruktivisme

Teori ini berpendapat bahwa pembelajaran adalah proses aktif di mana individu membangun pengetahuan baru berdasarkan pengalaman mereka sebelumnya. Lev Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran dan konsep zona perkembangan proksimal yang menyatakan bahwa pembelajaran terjadi paling efektif ketika siswa bekerja pada tugas-tugas yang

sedikit di luar jangkauan kemampuan mereka saat ini dengan bantuan dari orang dewasa atau teman sebaya.

#### 4. Teori Humanisme

Teori ini menekankan pentingnya pengembangan individu secara holistik termasuk aspek emosional dan moral. Carl Rogers dan Abraham Maslow adalah tokoh-tokoh utama yang menekankan bahwa pendidikan harus berpusat pada siswa dan harus mencakup pengalaman belajar yang bermakna yang membantu individu mencapai aktualisasi diri.

#### 5. Teori Kritis

Teori ini berfokus pada bagaimana pendidikan dapat digunakan sebagai alat untuk mengubah struktur sosial yang tidak adil. Paulo Freire adalah salah satu tokoh utama yang mengemukakan konsep pendidikan sebagai praksis di mana pendidikan harus membebaskan dan memberdayakan individu untuk mengatasi ketidakadilan sosial dan ekonomi.

Setiap teori pendidikan menawarkan perspektif yang berbeda tentang bagaimana proses pembelajaran terjadi dan bagaimana pendidikan harus dirancang dan diimplementasikan. Dalam konteks penelitian ini pemahaman tentang berbagai teori pendidikan dapat membantu dalam menganalisis bagaimana pendidikan dapat mempengaruhi dimensi politik, ekonomi, dan sosial serta bagaimana sistem pendidikan dapat ditingkatkan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

## ***BAB 3*** ***RELASI PENDIDIKAN DENGAN DIMENSI POLITIK, EKONOMI, DAN SOSIAL***

### **A. Realisasi Pendidikan dengan Dimensi Politik**

#### **1. Peran Pendidikan dalam Pembangunan Politik**

Pendidikan memainkan peran krusial dalam pembangunan politik dengan menyediakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk partisipasi aktif dalam proses politik. Pendidikan berfungsi sebagai sarana untuk menyebarkan nilai-nilai demokratis, seperti kebebasan, kesetaraan, dan keadilan yang esensial bagi pembentukan sistem politik yang stabil dan berfungsi dengan baik. Melalui pendidikan individu diajarkan tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara serta cara-cara untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Di banyak negara pendidikan telah digunakan sebagai alat untuk mempromosikan ideologi negara dan membentuk identitas nasional. Dalam konteks ini kurikulum pendidikan dirancang untuk mengajarkan sejarah nasional, nilai-nilai budaya, dan struktur politik negara. Misalnya di negara-negara dengan sejarah kolonialisme pendidikan sering difokuskan pada pembentukan identitas nasional yang kuat dan penanaman nilai-nilai anti-kolonial (Fagerlind & Saha, 1989).

Lebih jauh pendidikan berperan dalam pembangunan politik melalui pengembangan kapasitas kritis individu. Kemampuan berpikir kritis yang dikembangkan melalui pendidikan memungkinkan individu untuk mengevaluasi informasi secara objektif membuat keputusan yang berdasarkan pada bukti dan

berpartisipasi dalam diskusi politik dengan cara yang konstruktif. Pendidikan yang baik tidak hanya mengajarkan siswa untuk menerima informasi secara pasif tetapi juga untuk mempertanyakan, menganalisis, dan mengkritisi informasi yang mereka terima (Gutmann, 1987).

## 2. Pendidikan dan Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah elemen kunci dalam sistem demokrasi dan pendidikan memainkan peran penting dalam mendorong partisipasi politik yang lebih luas dan lebih efektif. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang lebih tinggi berkorelasi dengan tingkat partisipasi politik yang lebih tinggi, baik dalam bentuk pemungutan suara, keanggotaan partai politik, maupun keterlibatan dalam kegiatan politik lainnya (Verba, Scholzman, & Brady, 1995).

Pendidikan meningkatkan partisipasi politik dengan memberikan pengetahuan yang diperlukan tentang proses politik, isu-isu kebijakan, dan hak serta kewajiban sebagai warga negara. Individu yang terdidik lebih mungkin untuk memahami pentingnya partisipasi politik dan merasa lebih siap untuk terlibat dalam aktivitas politik. Mereka juga cenderung memiliki keterampilan komunikasi yang lebih baik yang penting untuk berpartisipasi dalam diskusi politik dan advokasi kebijakan (Niemi & Junn, 1998).

Selain itu pendidikan juga berperan dalam mengembangkan sikap positif terhadap partisipasi politik. Pendidikan dapat membentuk sikap dan nilai-nilai yang mendukung partisipasi aktif dalam kehidupan politik, seperti rasa tanggung jawab sosial, kepercayaan terhadap sistem politik, dan komitmen terhadap nilai-nilai demokratis. Pendidikan yang menekankan partisipasi siswa

dalam proses pengambilan keputusan sekolah, misalnya dapat mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan keterlibatan politik di kalangan siswa (Galston, 2001).

### 3. Pendidikan dan Stabilitas Politik

Stabilitas politik adalah prasyarat bagi pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan dan pendidikan memainkan peran penting dalam menciptakan dan memelihara stabilitas politik. Pendidikan dapat berkontribusi pada stabilitas politik dengan berbagai cara termasuk dengan mempromosikan kohesi sosial, mengurangi ketidaksetaraan, dan mengajarkan resolusi konflik secara damai.

Pendidikan yang inklusif dan adil dapat mengurangi ketegangan sosial dan politik dengan menyediakan kesempatan yang sama bagi semua individu terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, atau etnis mereka. Ketidaksetaraan dalam akses dan kualitas pendidikan sering kali menjadi sumber ketidakpuasan dan konflik sosial. Dengan memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas negara dapat mengurangi potensi konflik dan meningkatkan stabilitas politik (Collier, 2000).

Lebih lanjut pendidikan juga berperan dalam membangun kohesi sosial dengan mempromosikan pemahaman dan penghargaan terhadap keragaman. Kurikulum yang mencakup pendidikan multikultural dan nilai-nilai toleransi dapat membantu mengurangi prasangka dan diskriminasi serta mempromosikan harmoni sosial. Di masyarakat yang terfragmentasi secara etnis atau religius pendidikan dapat berfungsi sebagai alat untuk membangun jembatan antara kelompok-kelompok yang berbeda dan mendorong integrasi sosial (Banks, 2008).

Pendidikan juga mengajarkan keterampilan untuk resolusi konflik dan negosiasi yang penting untuk memelihara stabilitas politik. Melalui pendidikan individu dapat belajar tentang pentingnya dialog, kompromi, dan kerjasama dalam menyelesaikan perbedaan dan konflik. Program pendidikan yang berfokus pada pembangunan perdamaian dan resolusi konflik telah terbukti efektif dalam mengurangi kekerasan dan meningkatkan stabilitas di berbagai konteks (Harris & Morrison, 2003).

Dengan demikian pendidikan memiliki peran yang multifaset dalam mempengaruhi stabilitas politik. Melalui penyediaan kesempatan yang adil, promosi kohesi sosial, dan pengajaran resolusi konflik pendidikan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap terciptanya lingkungan politik yang stabil dan damai.

## **B. Realisasi Pendidikan dengan Dimensi Ekonomi**

### **1. Teori Modal Manusia**

Teori modal manusia menyatakan bahwa investasi dalam pendidikan meningkatkan keterampilan dan produktivitas individu yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan dan kontribusi ekonomi mereka. Dikembangkan oleh ekonom seperti Gary Becker dan Theodore Schultz pada pertengahan abad ke-20, teori ini menekankan bahwa pendidikan adalah bentuk investasi dalam modal manusia mirip dengan investasi dalam modal fisik seperti mesin atau bangunan (Becker, 1964; Schultz, 1961).

Modal manusia mencakup pengetahuan, keterampilan, kompetensi, dan atribut lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan individu untuk bekerja dan menghasilkan nilai ekonomi. Menurut teori ini, individu yang memiliki pendidikan lebih tinggi

cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi dan pasar, serta memiliki potensi penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang memiliki tingkat pendidikan lebih rendah. Pendidikan juga meningkatkan kemampuan kognitif seperti pemecahan masalah dan pemikiran kritis yang sangat berharga di pasar tenaga kerja yang dinamis.

## 2. Dampak Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pendidikan memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa mekanisme melalui mana pendidikan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi:

### a. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja

Pendidikan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan individu yang meningkatkan produktivitas mereka di tempat kerja. Tenaga kerja yang lebih produktif dapat menghasilkan output yang lebih besar dengan input yang sama yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Barro, 1991).

### b. Inovasi dan Adopsi Teknologi

Pendidikan yang tinggi mendorong inovasi dan pengembangan teknologi baru. Individu yang terdidik cenderung lebih mampu melakukan penelitian dan pengembangan serta mengadopsi teknologi baru dengan lebih efisien. Inovasi teknologi ini adalah pendorong utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Romer, 1990).

### c. Pengurangan Ketimpangan Pendapatan

Pendidikan dapat membantu mengurangi ketimpangan pendapatan dengan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi individu dari berbagai latar belakang untuk meningkatkan

keterampilan mereka dan mengakses pekerjaan yang lebih baik. Dengan mengurangi ketimpangan pendidikan dapat meningkatkan stabilitas sosial dan ekonomi yang penting untuk pertumbuhan yang berkelanjutan (Psacharopoulos & Patrinos, 2004).

d. Meningkatkan Kesehatan dan Kesejahteraan

Pendidikan juga berhubungan erat dengan peningkatan kesehatan dan kesejahteraan. Individu yang terdidik cenderung memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang praktik kesehatan yang mengarah pada populasi yang lebih sehat dan produktif. Kesehatan yang lebih baik mengurangi biaya perawatan kesehatan dan meningkatkan produktivitas ekonomi (Cutler & Lleras-Muney, 2006).

Banyak penelitian empiris mendukung hubungan positif antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Misalnya penelitian oleh Mankiw, Romer, dan Weil (1992) menunjukkan bahwa akumulasi modal manusia adalah salah satu faktor utama yang menjelaskan perbedaan pertumbuhan ekonomi antar negara. Penelitian lain oleh Hanushek dan Woessmann (2008) menemukan bahwa kualitas pendidikan yang diukur melalui hasil tes internasional berhubungan kuat dengan tingkat pertumbuhan ekonomi.

3. Pendidikan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Pendidikan berperan langsung dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui beberapa cara:

a. Pengembangan Keterampilan

Pendidikan memberikan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung, serta keterampilan khusus yang diperlukan dalam berbagai bidang pekerjaan. Keterampilan ini

memungkinkan pekerja untuk melakukan tugas mereka dengan lebih efisien dan efektif yang meningkatkan produktivitas keseluruhan (Becker, 1964).

b. Adaptasi terhadap Perubahan Teknologi

Di era digital, teknologi berkembang dengan cepat dan tenaga kerja yang terdidik lebih mampu beradaptasi dengan perubahan ini. Pendidikan yang berkelanjutan dan pelatihan ulang membantu pekerja tetap relevan di pasar tenaga kerja yang terus berubah (Autor, 2014).

c. Kemampuan Manajerial dan Kepemimpinan

Pendidikan yang lebih tinggi sering kali mencakup pelatihan dalam keterampilan manajerial dan kepemimpinan. Individu dengan keterampilan ini mampu mengelola tim dan sumber daya dengan lebih efisien yang dapat meningkatkan produktivitas organisasi (Bloom et al., 2013).

d. Peningkatan Motivasi dan Kepuasan Kerja

Pendidikan juga dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karena individu yang terdidik lebih cenderung menemukan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Kepuasan kerja yang tinggi berhubungan dengan produktivitas yang lebih tinggi (Judge et al., 2001).

e. Kesehatan dan Kehadiran Kerja

Seperti yang telah disebutkan pendidikan meningkatkan kesadaran kesehatan yang dapat mengurangi absensi karena sakit dan meningkatkan kehadiran kerja. Tenaga kerja yang sehat lebih produktif dan mampu bekerja dengan konsistensi yang lebih tinggi (Bloom & Canning, 2000).

Penelitian empiris menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara tingkat pendidikan dan produktivitas tenaga kerja. OECD (2010) melaporkan bahwa setiap tambahan tahun pendidikan formal dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja hingga 10%. Demikian pula, laporan oleh World Bank (2018) menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan memiliki dampak signifikan terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Secara keseluruhan pendidikan adalah investasi yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi. Dengan meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja mendorong inovasi teknologi, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan kesejahteraan pendidikan berkontribusi langsung pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

### **C. Realisasi Pendidikan dengan Dimensi Sosial**

#### **1. Pendidikan sebagai Alat untuk Mengurangi Kesenjangan Sosial**

Pendidikan memiliki potensi yang besar untuk mengurangi kesenjangan sosial dengan menyediakan kesempatan yang sama bagi individu dari berbagai latar belakang untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Kesenjangan sosial seringkali disebabkan oleh perbedaan dalam akses terhadap sumber daya, termasuk pendidikan. Dengan memastikan akses pendidikan yang merata kita dapat mengurangi disparitas sosial dan ekonomi di masyarakat.

Pendidikan yang inklusif dan berkualitas dapat membantu mengangkat individu dari kemiskinan dan memberikan mereka alat untuk mencapai keberhasilan ekonomi dan sosial. Pendidikan memberikan individu keterampilan yang dibutuhkan untuk

mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan berpenghasilan lebih tinggi yang pada gilirannya dapat mengurangi ketimpangan pendapatan (OECD, 2012). Selain itu pendidikan yang setara juga memungkinkan kelompok-kelompok yang kurang beruntung untuk berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi dan sosial secara lebih penuh yang memperkuat kohesi sosial dan mengurangi ketegangan sosial.

Penelitian menunjukkan bahwa program pendidikan yang dirancang untuk menjangkau kelompok-kelompok yang terpinggirkan seperti anak-anak dari keluarga miskin atau kelompok etnis minoritas dapat memiliki dampak signifikan dalam mengurangi kesenjangan sosial. Misalnya program beasiswa dan bantuan keuangan dapat membantu siswa dari latar belakang ekonomi yang kurang beruntung untuk melanjutkan pendidikan tinggi dan meningkatkan prospek pekerjaan mereka (Haveman & Wolfe, 1995).

## 2. Pendidikan dan Mobilitas Sosial

Pendidikan juga merupakan kunci utama dalam meningkatkan mobilitas sosial yaitu kemampuan individu untuk berpindah dari satu tingkat status sosial ke tingkat yang lebih tinggi. Mobilitas sosial seringkali diukur melalui perubahan dalam status pekerjaan atau pendapatan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pendidikan memainkan peran penting dalam proses ini.

Pendidikan memberikan landasan bagi individu untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan lebih bergaji tinggi. Dengan demikian pendidikan dapat membantu individu dari latar belakang ekonomi yang kurang beruntung untuk naik ke tingkat sosial yang lebih tinggi. Studi menunjukkan bahwa tingkat

pendidikan yang lebih tinggi berkorelasi dengan peningkatan mobilitas sosial karena pendidikan membuka akses ke peluang kerja yang lebih baik dan penghasilan yang lebih tinggi (Blanden et al., 2005).

Selain itu pendidikan juga membantu memecahkan siklus kemiskinan antar generasi. Anak-anak dari keluarga yang berpendidikan tinggi cenderung memiliki peluang yang lebih baik untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas yang pada gilirannya meningkatkan peluang mereka untuk sukses secara ekonomi dan sosial. Dengan demikian pendidikan tidak hanya meningkatkan mobilitas sosial individu tetapi juga memberikan manfaat antar generasi.

Mobilitas sosial yang tinggi juga bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Ketika lebih banyak individu memiliki akses ke peluang pendidikan dan ekonomi yang lebih baik, masyarakat menjadi lebih adil, dan dinamis. Ini dapat meningkatkan inovasi, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat demokrasi dan stabilitas sosial (Chetty et al., 2014).

### 3. Pendidikan dan Kualitas Hidup

Pendidikan memiliki dampak yang luas dan mendalam terhadap kualitas hidup individu. Kualitas hidup mencakup berbagai aspek kesejahteraan termasuk kesehatan, kepuasan hidup, dan partisipasi sosial, serta pendidikan memainkan peran penting dalam meningkatkan aspek-aspek ini.

a. Kesehatan

Pendidikan yang baik seringkali dikaitkan dengan peningkatan kesehatan. Individu yang terdidik lebih cenderung memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang praktik-praktik kesehatan yang baik seperti nutrisi, kebersihan, dan gaya hidup sehat. Mereka juga cenderung lebih sadar akan pentingnya pencegahan penyakit dan akses terhadap layanan kesehatan. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan yang lebih tinggi berhubungan dengan harapan hidup yang lebih panjang dan risiko penyakit kronis yang lebih rendah (Cutler & Lleras-Muney, 2006).

b. Kepuasan Hidup

Pendidikan dapat meningkatkan kepuasan hidup dengan menyediakan peluang yang lebih baik untuk pengembangan diri dan realisasi potensi individu. Pendidikan membuka pintu bagi individu untuk mengejar karier yang memuaskan dan bermakna yang dapat meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan hidup secara keseluruhan. Selain itu pendidikan juga membantu individu untuk mengembangkan keterampilan sosial dan jaringan yang dapat meningkatkan kualitas hubungan interpersonal dan dukungan sosial (Oreopoulos & Salvanes, 2011).

c. Partisipasi Sosial

Pendidikan mendorong partisipasi sosial dengan meningkatkan kesadaran individu tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Individu yang terdidik lebih cenderung terlibat dalam kegiatan masyarakat, organisasi sosial, dan aktivitas sukarela. Partisipasi sosial ini tidak hanya bermanfaat bagi individu tetapi juga memperkuat komunitas dan masyarakat

menentukan karena pengesahan suatu tata aturan agar menjadi kebijakan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah ada ditangan mereka. Legislatif disebut sebagai aktor utama dalam merumuskan/mengesahkan kebijakan. Para legislator tersebut berada pada tataran MPR, DPD, DPR, DPRD I, dan DPRD II.

b. Eksekutif

Eksekutif di sini adalah para pelaksana undang-undang sekaligus berperan dalam merumuskan kebijakan agar kebijakan yang dibuat atau dirumuskan oleh legislatif dapat dilaksanakan sesuai dengan faktor kondisional dan situasional. Eksekutif biasanya merumuskan kembali kebijakan yang dibuat legislatif dalam bentuk kebijakan jbaran. Eksekutif memiliki kekuasaan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh legislatif serta merumuskan kembali atau tidak merumuskan dengan alasan tertentu. Aktor eksekutif di sini antara lain presiden, menteri, gubernur, bupati, walikota, dan kepala dinas. Sedangkan aktor eksekutif dalam bidang pendidikan adalah menteri pendidikan nasional, menteri agama, direktorat jenderal, kepala dinas, dan rektor.

c. Administrator

Administrator sebagai perumus dan implementator kebijakan memegang peranan penting dalam pencapain tujuan negara yang akan terimplementasikan dalam setiap program nyata yang akan dirasakan oleh masyarakat dengan tujuan utama masyarakat sejahtera.

d. Partai Politik (Parpol)

Partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir serta berusaha untuk mengendalikan pemerintahan agar dapat melaksanakan program-programnya dan menempatkan anggota-anggotanya dalam jajaran pemerintahan. Di Indonesia peran parpol sangat besar sehingga hampir semua aspek kebijakan termasuk dalam bidang pendidikan akan melibatkan parpol. Peran parpol di sini dengan menempatkan anggotanya di legislatif dan pimpinan negara maupun daerah.

e. *Interest Group* (kelompok berkepentingan)

*Interest group* ialah suatu kelompok yang beranggotakan orang-orang yang memiliki kepentingan sama seperti kelompok buruh, nelayan, petani, guru, dan kelompok profesional lainnya. Kelompok ini berusaha mempengaruhi perumus kebijakan formal agar kepentingan kelompoknya dapat terakomodasi dalam kebijakan yang drumuskan. Kelompok ini biasanya memiliki tuntutan yang bersifat khusus, sempit, dan spesifik.

f. Organisasi Masyarakat (Ormas)

Ormas merupakan kumpulan orang yang mempunyai cita-cita dan keinginan sama, bersifat nonpolitis meskipun dalam kiprahnya sering bersentuhan dengan kepentingan politik. Ormas dapat berdiri sendiri (independen) atau berafiliasi dengan organisasi politik tertentu. Dalam perumusan kebijakan pendidikan ormas memiliki harapan dan aspirasi yang kemudian disampaikan kepada para perumus kebijakan formal. Di Indonesia ada beberapa ormas yang memiliki pengaruh besar dalam perumusan kebijakan pendidikan oleh pemerintah seperti NU, Muhammadiyah, ICMI, HMI, PMII, dan KAHMI.

g. Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi adalah suatu lembaga di mana para *elite* akademisi berada. Perguruan tinggi sering dijadikan ujung tombak dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat yang akan dimasukkan dalam nilai-nilai idealisme masih dipertahankan, dan dalam mengupayakan berbagai kebijakan tidak akan lepas dari muatan-muatan intelektual. Perumusan kebijakan yang baik seharusnya memuat naskah akademik yang dibahas bersama para akademisi di perguruan tinggi.

h. Tokoh perorangan.

Dalam berbagai konstelasi tokoh perorangan memegang peran cukup vital dan terkadang sangat menentukan. Dia juga dapat menjadi tokoh sentral. Tokoh perorangan dapat berasal dari berbagai bidang seperti keagamaan, politik, ekonomi, pendidikan, budaya, seni, dan sebagainya.

### C. Legitimasi Kebijakan Pendidikan

1. Proses Legitimasi Kebijakan Pendidikan

Legitimasi mengacu pada prinsip menunjukkan penerimaan publik terhadap kebencian terhadap pemimpin, pemerintah dan pejabat. Berdasarkan persetujuan pemimpin dan administrator yang berkuasa sesuai dengan prosedur yang berlaku dan ditegakkan oleh publik termasuk nilai-nilai politik atau moral. Pada umumnya legitimasi diserahkan kepada yang berkuasa dengan berbagai cara untuk menyampaikannya kepada masyarakat yang berbeda. Penyerahan tersebut juga dapat dilihat dari berbagai perspektif masyarakat yang kebanyakan bersifat keagamaan atau non-keagamaan seperti beberapa contoh penyerahan legitimasi dan

penyerahan kepada yang berkuasa yaitu lahirnya kerajaan dan penobatan monarki, pemilihan dan sumpah yang demokratis, dan lain-lain. Legitimasi juga merupakan bentuk desain yang menciptakan hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin.

Legitimasi dapat diartikan dalam arti luas atau sempit. Legitimasi dalam arti luas adalah dukungan masyarakat dengan institusi politik sedangkan legitimasi dalam arti sempit adalah dukungan publik untuk memberdayakan pemerintah. Legitimasi antara kekuatan normatif dan kualitas pribadi sangat terkait. Legitimasi kebijakan pendidikan dapat digolongkan sebagai kebijakan publik di bidang pendidikan yang bertujuan untuk mencapai tujuan bernegara dan bernegara di bidang pendidikan. Legitimasi kebijakan pendidikan pada hakikatnya terdiri dari bentuk pengambilan keputusan dengan substansi berupa tujuan, prinsip, dan aturan. Format yang digunakan dalam legitimasi kebijakan pendidikan biasanya dituliskan dan disahkan untuk sebagai pedoman oleh pemimpin pemegang kekuasaan, staf dan personal organisasi yang terkait serta interaksinya dengan lingkungan eksternal yang masih berkaitan.

Konsepsi sebuah legitimasi ditandai dengan sebuah perspektif individu terhadap sebuah kekuatan dan kekuasaan. Dengan begitu bisa diartikan bahwa apakah daerah setempat mengakui dan memandang adanya hak perintis yang diharapkan dapat membantu serta melaksanakan apa yang telah disetujui dan terikat daerah tersebut ataupun tidak. Adapun jika dalam hal tersebut daerah setempat mengakui dan memandang adanya hak perintis yang diharapkan dapat membantu serta melaksanakan apa yang menjadi pengikat daerah setempat maka pihak yang berwenang berhak

mengatur sebagai otentik atau melegitimasi. Artinya keaslian datang dari sebuah pengakuan masyarakat atas dasar keistimewaan para pionir agar bisa menetapkan dan melakukan pemilihan politik. Secara bahasa (etimolog), legitimasi bersumber dari bahasa Latin, *Lex* yang mengandung arti sebuah hukum.

Sebuah teori legitimasi sangat penting bagi sebuah organisasi karena setiap prinsip legitimasi dilandasi atas norma yang mengandung nilai dari peraturan sosial menjadi sebuah organisasi merasakan akan adanya eksistensi dan aktivitas yang telah terlegitimasi. Diindikasikan oleh Silalahi, dikutip oleh Ali Imron, (Farid Setiawan; 2007) kata legitimasi berasal dari kata *legitimacy* yang memiliki arti memberi sebuah kekuasaan atas posisi yang premis, aktivitas sebuah rancangan politik, termasuk siklus penataan, rekomendasi agar bisa menangani sebuah isu dan kasus yang muncul dari ranah politik.

Legitimasi juga berasal dari sebuah kata keaslian yang menunjukkan peredaran tertentu di mana program sebuah pemerintahan disetujui dan dilegitimasi sehingga cenderung terlihat bahwasanya legitimasi mengandung dua implikasi yaitu; yang mengatur sebuah posisi untuk memberikan arahan untuk sebuah tindakan dan seorang yang bertanggung jawab atas program yang diusulkannya. Legitimasi merupakan sebuah kegiatan yang mengesahkan dan merumuskan dengan sebuah pelaksanaan kebijakan. Sebelum sebuah kebijakan pendidikan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan terlebih dahulu harus diadakan aktivitas legitimasi. Sebuah kebijakan perlu dilegitimasi karena hasil dari kebijakan tersebut perlu didukung oleh masyarakat setempat.

Pengakuan dari masyarakat ini pada umumnya dilakukan melalui badan-badan perwakilan rakyat.

Pengakuan masyarakat ini penting karena ketika kebijakan diimplementasikan tanpa persetujuan masyarakat ada ketakutan akan penolakan oleh masyarakat lokal. Bagaimanapun juga pelaksanaan kebijakan pendidikan harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam setiap kegiatannya.

Dengan adanya kewenangan inilah mereka yang memiliki kewenangan harus bisa melaksanakan program juga akan diminta atas pertanggungjawaban atas hasil pelaksanaan kegiatan kewenangannya. Dari uraian yang telah dijelaskan oleh para pakar di atas bisa diambil kesimpulan bahwasanya legitimasi adalah sebuah pemberian wewenang terhadap lembaga untuk membuat dan melaksanakan sebuah keputusan sebagai bentuk pengesahan atas dasar persetujuan masyarakat. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan sebuah kebijakan pendidikan maka kebijakan pendidikan tersebut dikatakan terlegitimasi atau berlaku setelah mendapatkan pengakuan dan persetujuan oleh masyarakat setempat dan dari dinas yang terkait.

Kebijakan yang telah dibuat atau diformulasikan harus disahkan atau dilegitimasi terlebih dahulu sebelum diterapkan kepada masyarakat. Legitimasi ini sangat penting karena dapat membawa dampak yang positif maupun negatif. Tahapan untuk mendapatkan dan mempertahankan legitimasi dapat dikelompokkan menjadi tiga yakni:

- a. Simbolis, yakni dengan mengedepankan kepercayaan pada masyarakat secara simbolik yaitu berupa simbol-simbol seperti penghormatan nilai-nilai budaya juga tradisi dan kepribadian

yang baik. Contoh kegiatannya seperti pementasan wayang dan upacara kenegaraan.

- b. Prosedural, yakni menjanjikan kemakmuran materi kepada rakyat. Contohnya antara lain menyediakan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang lebih baik, menjamin ketersediaan pangan yang dibutuhkan masyarakat, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, menjanjikan fasilitas produksi pertanian, telekomunikasi, dan transportasi, serta modal yang cukup.
- c. Materil, yakni untuk menentukan wakil-wakil rakyat, presiden, para menteri, dan yang lainnya dengan mengadakan pemilihan umum.

Menurut Andrain pengelompokan legitimasi berdasarkan prinsip dukungan dan pengakuan dari masyarakat kepada pemerintah terbagi menjadi lima tipe yakni:

- a. Legitimasi tradisional, yakni kesadaran masyarakat untuk memberi dukungan dan pengakuan terhadap pemimpin pemerintahan. Karena para pemimpin ini adalah keturunan dari para pemimpin "Darah Biru" yang dipercaya bertanggung jawab dalam menjalankan amanah.
- b. Legitimasi ideologi, yakni masyarakat menaruh dukungan kepada pemimpin pemerintahan. Para pemimpin ini dianggap sebagai pelaksana dan penafsir ideologis. Artinya tidak hanya ideologi doktrinal seperti komunisme tetapi juga ideologi praktis seperti liberalisme dan ideologi Pancasila.
- c. Legitimasi kualitas pribadi, yaitu kesadaran masyarakat dan dukungan kepada pemerintah karena pemimpin memiliki kualitas pribadi yang karismatik dan sikap baik hati serta prestasi yang membanggakan di bidang tertentu.

- d. Legitimasi prosedural, yakni pemimpin yang memiliki kewenangan menurut tata cara yang ditetapkan undang-undang sehingga masyarakat memberikan persetujuan dan dukungan kepada pemerintah.
- e. Legitimasi instrumental, yakni masyarakat yang memberikan kesadaran dan dukungan kepada pemerintah karena pemimpin tersebut menjamin atau menjanjikan kesejahteraan materi (instrumental) kepada masyarakat.

Kebijakan yang telah dirumuskan, ada kalanya masih dapat dimintakan pendapat secara langsung kepada rakyat. Kemudian rakyat tersebut diminta untuk memberikan dukungan. Akan tetapi ada juga kebijakan tersebut dimintakan dukungan oleh aktor kebijakan kepada tokoh-tokoh kunci atau nonformal yang ada di masyarakat. Dengan tujuan agar tokoh nonformal atau kunci tersebut yang kemudian akan mengumpulkan dukungan kepada massa atau rakyat. Tokoh-tokoh kunci atau informal ini ada di sektor profesi, agama, seni dan budaya, bisnis, pertanian, bahkan bisnis dan jasa. Tokoh informal ini tidak menyanggah status pemerintahan tetapi umumnya memiliki massa dan menaruh kepercayaan besar kepada mereka. Pada beberapa kasus tokoh-tokoh kunci yang diusulkan diterima dengan baik.

Kebijakan yang telah dibuat dan disahkan secara resmi bukanlah hal yang final. Namun hal tersebut masih dapat direvisi, diperbaiki, dan ditingkatkan. Dan pengesahan ini dilakukan antara lain untuk melengkapinya agar tidak menemui kendala dalam pelaksanaannya. Dengan legitimasi ini orang akan menanggapi keinginan dan harapan mereka dan akan mengungkapkan dukungan mereka. Sementara kegiatan legitimasi membutuhkan dukungan dan

kebijakan yang sempurna. Titik legitimasi adalah pengembangan kebijakan yang sah dan final.

## 2. Problema Legitimasi Kebijakan Pendidikan

Dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan terdapat banyak problema. Pertama adanya kekuatan dari mantan perumus kebijakan yang sudah tidak menjadi perumus lagi. Hal itu membuat adanya kehendak bahwa mantan perumus kebijakan tersebut beranggapan bahwa kebijakan yang telah ia rumuskan dahulu masih bisa dipertahankan sampai kini.

Problema yang kedua adanya penentangan dari kalangan konservatif terhadap kebijakan yang belum lama dirumuskan. Di sinilah kebijakan yang dibuat berbeda dengan kebijakan sebelumnya yang dianggap tradisional. Hal-hal tradisional umumnya sulit diubah, dan keinginan untuk mengubahnya membutuhkan waktu lama dalam masyarakat konservatif.

Ketiga sebagai akibat perlawanan dari golongan konservatif dan mantan perumus kebijakan yang bukan lagi perumus menyapu pendukungnya. Pengikutnya ini juga umumnya cenderung akan mengikuti gerakan dan langkah pemimpinnya. Hal ini akan menghambat dan mengganggu proses legalisasi atau setidaknya akan memakan waktu yang lebih lama.

Keempat adanya kekuatan dari kelompok yang memiliki persepsi, visi, dan kepentingan yang tidak sama dengan para perumus dan legitimator kebijakan. Kelompok perlawanan seperti ini pada umumnya tidak mudah untuk disingkirkan apabila tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, para legitimator berupaya merangkulnya untuk mendukung kebijakan yang telah dirumuskan.

Legitimasi juga dapat mengalami krisis jika seseorang dan lembaga legitimasi tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk mengelola negara. Dalam hal ini setelah legitimasi membutuhkan kapasitas dan kapabilitas untuk menerapkan program-program yang secara langsung menyentuh rakyat. Rakyat sebagai pemegang legitimasi tertinggi kesejahteraan dan keamanannya menjadi kriteria utama dalam menilai legitimasi kemampuan suatu bangsa. Dapat disimpulkan bahwa kekuasaan yang sah tidak selalu berbanding lurus dengan kemampuan.

Pada masa transisi umumnya dapat terjadi krisis legitimasi. Selain itu, terjadi pergeseran dari satu jenjang kualitas pembangunan ke jenjang kualitas pembangunan masyarakat lainnya. Masyarakat seperti ini lebih mengarah untuk mempertanyakan otoritas yang diyakini tidak mencerminkan keinginan hidup dalam masyarakat.

#### **D. Evaluasi Kebijakan Pendidikan**

##### **1. Pengertian dan Sifat Evaluasi Kebijakan Publik**

Secara umum, istilah evaluasi dipadankan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assesment*). Dalam arti spesifik, evaluasi berkaitan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan (Dunn 2003). Ketika hasil kebijakan memiliki nilai hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Hal ini mengandung arti pula bahwa suatu kebijakan atau program telah mencapai kinerja yang bermakna, yang berarti masalah-masalah kebijakan yang dibuat telah jelas dan dapat diatasi.

Aktivitas evaluasi seringkali disamaartikan dengan kegiatan pemantauan. Kegiatan pemantauan berbeda dengan aktivitas evaluasi

kebijakan. Pemantauan utamanya menekankan pada pembentukan premis-premis faktual mengenai kebijakan publik sedangkan evaluasi memfokuskan diri pada penciptaan premis-premis nilai yang diperlukan untuk menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan (Dunn; 2003). Pendek kata, pemantauan hendak menjawab pertanyaan “apa yang terjadi, bagaimana, dan mengapa? Sedangkan evaluasi menjawab pertanyaan “apa perbedaan yang telah dibuat?

Setiap evaluasi kebijakan memiliki ciri-ciri tertentu yang dapat dijadikan sebagai patokan bagi seorang analis untuk melakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan. Ciri-ciri evaluasi kebijakan dimaksud di antaranya (1) tujuannya menemukan hal-hal strategis, untuk meningkatkan kinerja kebijakan, (2) evaluator mampu mengambil jarak dari pembuat kebijakan, pelaksana, dan target kebijakan, (3) prosedur dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis, (4) dilaksanakan tidak dalam suasana permusuhan dan kebencian, (5) mencakupi rumusan, implementasi, lingkungan, dan kinerja kebijakan (Nugroho 2009).

Dunn (2003) mencatat bahwa evaluasi kebijakan memiliki sejumlah karakteristik yang berbeda dari metode analisis kebijakan lainnya. Pertama, fokus nilai. Evaluasi merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial dari suatu kebijakan atau program. Oleh karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, maka evaluasi juga berkenaan dengan prosedur untuk mengevaluasi tujuan dan sasaran kebijakan. Kedua, interdependensi fakta-nilai. Tuntutan evaluasi tergantung pada fakta dan nilai. Untuk memastikan bahwa kebijakan atau program telah mencapai kinerja yang tertinggi, diperlukan tidak hanya hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok, atau

masyarakat; tetapi juga harus didukung oleh sejumlah bukti bahwa kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Ketiga, orientasi masa kini dan masa lalu.

## 2. Fungsi Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Evaluasi kebijakan memainkan peran penting dalam memberikan umpan balik tentang apa yang terjadi dalam suatu program/praktik/teknologi berkaitan dengan suatu kebijakan (Trochim 2009). Evaluasi kebijakan juga memandu bagaimana evaluasi dilakukan. Evaluasi kebijakan memuat sejumlah aturan dan prinsip yang menentukan kelompok atau organisasi menggunakan panduan keputusan dan tindakan ketika melakukan evaluasi. Evaluasi kebijakan dipandang penting karena evaluasi bernilai sebagai peran penanda dengan tipe-tipe mekanisme yang diperlihatkan.

Evaluasi kebijakan merupakan penanda bagi seluruh organisasi dan *stakeholder* tentang apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Evaluasi juga menginformasikan jenis evaluasi yang harus ditempuh, siapa yang bertanggung jawab di dalamnya, dan bagaimana seharusnya dilakukan. Evaluasi kebijakan bersifat tertulis sehingga dengan evaluasi membuat evaluasi akan menjadi lebih transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Hal ini dapat dipahami karena evaluasi yang dibuat tertulis dapat diketahui oleh publik dan mereka dapat mengkritisi kebijakan setiap saat. Evaluasi yang tertulis juga dapat disimpan dalam arsip baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy*. Evaluasi kebijakan juga merupakan proses belajar yakni tentang apa yang dilakukan dan hasilnya dapat digunakan bagi pihak lain untuk membuat kebijakan

baru. Mereka juga dapat membandingkan hasil dari evaluasi dengan praktik kebijakan yang sudah dilakukan.

Selain sebagaimana dikemukakan Trochim, Dunn (2003) mengungkapkan bahwa evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan publik. Pertama dan yang terpenting adalah memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yakni seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik (Dunn 2003). Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan tertentu misalnya peningkatan kualitas pendidikan dan target tertentu (20% disediakan oleh APBN) telah dicapai.

Kedua, evaluasi memberi kontribusi kepada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepastian tujuan dan target dalam kaitan dengan masalah yang dituju. Dalam menanyakan kepastian tujuan dan sasaran, analis dapat menguji alternatif sumber nilai maupun landasan mereka dalam berbagai bentuk rasionalitas. Dalam menghasilkan informasi kinerja kebijakan, analis menggunakan tipe kriteria yang berbeda untuk mengevaluasi hasil kebijakan. Tabel berikut menginformasikan tipe kriteria dimaksud.

Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk dalam hal perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi mengenai tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan. Evaluasi juga dapat berkontribusi pada definisi alternatif kebijakan baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan

bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus atau diganti dengan yang lain.

Wibawa (dalam Nugroho; 2009) mengungkapkan empat fungsi evaluasi kebijakan publik. Pertama, eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat juga dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan dimensi realitas yang diamati. Dari kegiatan ini, evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau pun kegagalan suatu kebijakan. Kedua, kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang diambil para pelaku kebijakan sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan kebijakan atau tidak. Ketiga, audit. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah *output* benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan atau tidak. Keempat, akunting. Dari evaluasi yang telah dilakukan akan dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan yang diterapkan.

### 3. Tipe-tipe Evaluasi Kebijakan Publik

James Anderson sebagaimana dikutip Winarno (2007) membagi evaluasi kebijakan ke dalam tiga tipe.

- a. Tipe pertama adalah evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Dalam kaitan ini para pembentuk dan administrator kebijakan selalu membuat pertimbangan-pertimbangan tentang manfaat atau dampak dari kebijakan, program, dan proyek yang akan dijalankan. Pertimbangan tersebut dapat bersifat ideologi atau menurut kepentingan pendukung dan kriteria lainnya. Program kesejahteraan rakyat misalnya oleh suatu kelompok tertentu akan dipandang sebagai program yang sangat sosialis terlepas dari pertimbangan apa dampak dari kebijakan tersebut. Tanpa melihat dampak

sesungguhnya, bisa saja kelompok tertentu menolak program tersebut karena ideologinya terlalu sosialis. Demikian pula penjualan saham BUMN akan dilihat sebagai proyek kapitalis oleh kelompok penentangannya karena kebijakan tersebut dipandang akan mengancam kepentingan rakyat. Kompensasi pencabutan subsidi BBM yang diberikan kepada rakyat kecil, oleh evaluator kebijakan dipandang tidak tepat karena evaluator mengetahui banyak orang yang tidak layak akan menerima keuntungan dari kompensasi pencabutan subsidi tersebut. Pandangan-pandangan tersebut muncul karena setiap evaluator dalam melihat persoalan akan menggunakan cara pandang yang berbeda. Hal ini dapat dipahami karena perspektif, ideologi, dan kultur mereka memang beraneka ragam.

- b. Tipe kedua adalah tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi ini berkaitan dengan pertanyaan berikut.
  - 1) Apakah program dilaksanakan dengan semestinya?
  - 2) Berapa biayanya?
  - 3) Siapa yang menerima manfaat (pembayaran atau pelayanan) dan berapa jumlahnya?
  - 4) Apakah terdapat duplikasi atau kejenuhan dengan program-program lain?
  - 5) Apakah ukuran-ukuran dasar dan prosedur-prosedur secara sah diikuti?

Pertanyaan-pertanyaan dari tipe evaluasi tersebut akan dapat menjamin bahwa kebijakan atau program akan dapat dilaksanakan secara lebih efisien. Kelemahan dari tipe evaluasi

tersebut adalah sedikitnya informasi yang diperoleh tentang dampak dari suatu program terhadap masyarakat.

- c. Tipe evaluasi kebijakan ketiga adalah tipe evaluasi kebijakan sistematis. Evaluasi sistematis melihat secara objektif program-program kebijakan yang dijalankan dapat mengukur dampaknya terhadap masyarakat, dan melihat sejauhmana tujuan-tujuan program tercapai. Evaluasi sistematis ini difokuskan pada melihat dampak dari suatu kebijakan dengan bertolak pada sejauh mana kebijakan tersebut menjawab kebutuhan atau masalah yang dihadapi masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan yang hendak dijawab dari evaluasi sistematis ini adalah:

- 1) apakah kebijakan yang dijalankan mencapai tujuan sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya?
- 2) berapa biaya yang telah dikeluarkan?
- 3) keuntungan apa yang dapat diperoleh?

Berdasarkan pada pertanyaan-pertanyaan tersebut, tipe evaluasi ini dapat memberi informasi kepada para pembuat kebijakan tentang dampak dari kebijakan yang telah ditetapkan dan dapat dilakukan upaya perubahan kebijakan berdasarkan informasi dampak kebijakan yang telah diperoleh

Dari tiga tipe evaluasi tersebut, tipe yang ketiga merupakan jenis evaluasi yang paling baik, karena tipe evaluasi tersebut lebih bersifat ilmiah dan menggunakan prosedur ilmiah untuk melakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan atau program.

Berdasarkan prosedur ilmiah ini, Edward A. Suchman (dalam Winarno 2007) mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan:

- a. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
- b. Analisis terhadap masalah
- c. Deskripsi dan standarisasi kegiatan
- d. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi
- e. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau penyebab yang lain
- f. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

## ***BAB 6*** ***IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN*** ***DI TINGKAT MAKRO***

### **A. Kebijakan Pendidikan di Indonesia**

Setiap kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan akan berdampak pada pengambilan keputusan oleh para pembuat kebijakan dalam bidang pendidikan, baik di tingkat nasional maupun daerah dan tingkat satuan pendidikan. Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagai sebuah lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk membuat sebuah kebijakan paling tinggi di Indonesia tentunya sangat mempengaruhi eksistensi dan prosesi pendidikan yang diharapkan memiliki standar mutu yang layak di dalam lingkungan masyarakat dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian keberadaan dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan pemerintah pusat yang dipimpin oleh presiden dan seorang wakil presiden, jajaran kementerian, dan jajaran badan atau lembaga kelengkapan eksekutif negara adalah para pembuat kebijakan yang bisa mempengaruhi dunia pendidikan nasional.

Namun, khususnya pada tingkat nasional, para pengambil keputusan khusus masalah pendidikan di tingkat DPR RI adalah Komisi X DPR RI Presiden RI, dan Menteri Pendidikan Nasional RI (Pemimpin Departemen Pendidikan Nasional) sehingga segala bentuk kebijakan pendidikan nasional yang dihasilkan oleh ketiga elemen ini akan mempengaruhi kebijakan pendidikan di seluruh daerah dan seluruh satuan pendidikan di Indonesia.

Adapun peran pengambil kebijakan yang bisa mempengaruhi masalah pendidikan di tingkat daerah ialah DPRD dan Pemerintah Daerah (Pemda). Khususnya dalam masalah pendidikan, posisi Komisi E di

DPRD dan Dinas Pendidikan di Pemda sangatlah berperan untuk memfasilitasi adanya pemberlakuan kebijakan pendidikan di tingkat daerahnya masing-masing yang didasari oleh peraturan perundang-undangan dari hasil permusyawaratan *policy maker* nasional. Akhirnya, keberadaan satuan pendidikan pun tak kalah pentingnya untuk membuat kebijakan pendidikan yang akan mempengaruhi fenomena pendidikan yang berlangsung di satuan pendidikannya masing-masing.

Sehubungan dengan evaluasi kebijakan pendidikan Era Otonomi masih belum terformat secara jelas maka di lapangan masih timbul bermacam-macam metode dan cara dalam melaksanakan program peningkatan mutu pendidikan. Sampai saat ini hasil dari kebijakan tersebut belum tampak, namun berbagai improvisasi di daerah telah menunjukkan warna yang lebih baik. Misalnya, beberapa langkah program yang telah dijalankan di beberapa daerah, berkaitan dengan kebijakan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu berbasis sekolah dan peningkatan mutu pendidikan berbasis masyarakat diimplementasikan sebagai berikut:

1. Tidak berlakunya UN atau UNAS sebagai pengganti Penilaian Akhir Menjadi PSAJ (Yaitu Penilaian Sumatif Akhir Jenjang)
2. Telah dibentuknya Komite Sekolah sebagai pengganti BP3.
3. Telah diterapkan muatan lokal dan pelajaran keterampilan di sekolah SMP
4. Dihapuskannya sistem Rayonisasi dalam penerimaan murid baru dan diganti dengan sistem zonasi
5. Pemberian insentif kepada guru-guru negeri, melalui pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
6. Bantuan dana operasional sekolah, serta bantuan peralatan praktik sekolah.

7. Bantuan peningkatan SDM sebagai contoh pemberian beasiswa pada guru untuk mengikuti program Pascasarjana.
8. Peningkatan profesionalisme guru dan dosen melalui penyelenggaraan profesi guru dan dosen untuk memperoleh sertifikat pendidik dan menjadi guru dan dosen profesional.
9. Penerapan pendidikan budaya dan karakter bangsa bagi semua jenjang pendidikan.

Pada praktiknya, setiap kebijakan mengandung multi tujuan yaitu untuk menjadikan kebijakan itu sebagai kebijakan yang adil dan seimbang dalam mendorong kemajuan kehidupan bersama. Kebijakan pendidikan nasional disebut memperkuat peran negara dengan memastikan 20% anggaran negara untuk pendidikan nasional, namun di sisi lain ada pasal yang memperkuat peran publik dengan adanya komite-komite sekolah. Kebijakan publik, dengan demikian, selalu mengandung multi fungsi, untuk menjadikan kebijakan sebagai kebijakan yang adil dan seimbang dalam mendorong kemajuan kehidupan bersama. Meski pemahaman ini penting, hal yang lebih penting lagi bagi pemerintah atau lembaga publik adalah berkenaan dengan perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan.

## **B. Arah Kebijakan Pendidikan**

Kebijakan pendidikan di Indonesia berdasarkan (Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional, diarahkan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut:

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti;

2. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan;
3. Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara professional;
4. Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai;
5. Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen;
6. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
7. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan perlindungan sesuai dengan potensinya;

8. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi

### **C. Pelaksanaan Kebijakan Publik**

Proses pelaksanaan kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah dirinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana atau biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut. Ini merupakan syarat-syarat pokok bagi implementasi kebijakan publik apapun.

Tanpa adanya syarat-syarat tersebut maka kebijakan publik boleh dikatakan sekedar retorika politik atau slogan politik. Secara teoritik pada tahap implementasi proses perumusan kebijakan dapat digantikan tempatnya oleh proses implementasi kebijakan dan program-program kemudian diaktifkan. Tetapi dalam praktik perbedaan antar tahap perumusan kebijakan dan tahap implementasi kebijakan sebenarnya sulit dipertahankan karena umpan balik dari prosedur-prosedur implementasi mungkin menyebabkan diperlukannya perubahan-perubahan tertentu pada tujuan-tujuan dan arah kebijakan yang sudah ditetapkan atau aturan-aturan dan pedoman-pedoman yang sudah dirumuskan ternyata perlu ditinjau kembali sehingga menyebabkan peninjauan ulang terhadap pembuatan kebijakan pada segi implementasinya. Pelaksanaan kebijakan publik yang telah diterapkan di Indonesia yang telah dilakukan pemerintah cukup banyak salah satunya adalah penetapan alokasi dana untuk pendidikan sebesar 20% dari APBN, pemusatan oleh pemerintah untuk wajib belajar 12 tahun, serta yang tengah marak saat ini adalah perubahan

kurikulum yang semuanya itu dilakukan demi pencapaian tujuan pendidikan yang lebih maksimal. (Tawa 2019)

Pendidikan bukan hanya mempersiapkan tenaga kerja siap pakai melainkan mengemban misi yang jauh lebih besar. Misalnya pendidikan juga mempersiapkan generasi penerus dengan akhlak, moral, dan kepribadian yang baik, pendidikan juga bertanggungjawab atas karakter jatidiri sebagai bangsa; dunia pendidikan, terutama pendidikan tinggi juga diharapkan mampu menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemajuan kehidupan masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Kebijakan dasar dalam kaitannya dengan isu relevansi pendidikan dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun. Empat pilar pendidikan yang dikemukakan oleh UNESCO pada tahun 1996 yaitu bahwa pendidikan harus memungkinkan dan membekali siswa dengan kemampuan untuk belajar mengetahui (*learning to know*), belajar bekerja atau mengerjakan sesuatu (*learning to do*), belajar menjadi diri sendiri (*learning to be*), dan belajar untuk hidup bermasyarakat (*learning to live together*).
2. Perubahan Kurikulum, Kurikulum pendidikan selalu mengalami perubahan, hal ini didasari karena semata-mata ingin mempengaruhi tujuan pendidikan itu sendiri agar proses belajar mengajar semakin efektif.
3. Saat ini pemerintah tengah menggalakkan pelatihan terhadap pengajar yang ada di daerah agar semata-mata meningkatkan kualitas pengajar agar semakin baik. Pelatihan pengajar ini juga menuntut agar lebih loyalitas terhadap profesinya sehingga dapat menjadikan anak didik semakin berkarakter.

#### **D. Solusi Makro Pendidikan**

Beragam isu dalam Pendidikan Nasional menjadi tantangan utama dalam mencapai standar pendidikan yang baik. Masalah-masalah ini menjadi penyebab utama rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia saat ini, sehingga menjadi perhatian penting bagi negara ini. Kualitas individu yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikan yang diterima. Solusi pendidikan nasional pada tingkat makro melibatkan perubahan dan kebijakan yang bersifat menyeluruh dan berdampak luas terhadap sistem pendidikan secara keseluruhan. Berikut beberapa solusi yang dapat diimplementasikan:

1. Solusi mengatasi permasalahan makro pada kurikulum yang dirasa membingungkan dan terlalu kompleks.

Pada praktiknya, tidak semua guru memiliki kemampuan dan pengetahuan yang sama sehingga belum semua guru mampu merancang kegiatan pembelajaran yang dapat memungkinkan siswa untuk mengamati fenomena yang relevan dengan materi pelajaran. Kendala ini menjadi salah satu faktor yang menghambat implementasi kurikulum yang terus berubah. Oleh karena itu sangat penting bagi setiap sekolah untuk mengorganisir kegiatan religius bertujuan untuk mengurangi penurunan moral. Solusi ini bertujuan untuk mencegah keberadaan siswa yang cerdas namun kurang memiliki moralitas.

- a. Mengubah konsep dasar paradigma kurikulum menjadi suatu proses yang tepat untuk mencapai tujuan yang sebenarnya.
- b. Melakukan pemerataan pendidikan dengan menyediakan sarana dan prasarana yang merata di sekolah-sekolah terpencil, sehingga tidak ada lagi siswa di daerah terpencil yang tertinggal dalam pendidikan.

- c. Menjalankan kurikulum dengan sebaik mungkin, tanpa kompromi.
  - d. Membersihkan elemen-elemen kurikulum dari individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Lesson study atau workshop dapat membahas strategi pengajaran yang efektif.
  - e. *Lesson study* adalah strategi untuk meningkatkan proses dan hasil pembelajaran dengan melibatkan kolaborasi dan kerja sama antara sekelompok guru secara berkelanjutan. Dalam kerja sama ini, para guru dapat mengembangkan pemahaman tentang cara siswa belajar dan bagaimana cara terbaik untuk mengajar mereka. Selain itu *lesson study* juga memberikan kesempatan bagi guru untuk memperoleh pengetahuan baru dari sesama guru atau narasumber melalui umpan balik yang diberikan oleh anggota kelompok *lesson study*.
  - f. Pertemuan antar sekolah yang sudah menerapkan kurikulum yang berkembang saat ini. Melalui forum ini, akan tercipta kesempatan bagi para peserta untuk berbagi pengalaman mengenai implementasi kurikulum di sekolah masing-masing.
2. Aspek sosial budaya memiliki peran krusial dalam pembentukan kurikulum yang sesuai, mengingat kurikulum merupakan instrumen untuk mengimplementasikan sistem pendidikan, yang merupakan bagian integral dari kebudayaan. Implikasi mendasar dari hal ini adalah sebagai berikut:
- a. Penyusunan kurikulum harus mencerminkan kondisi sosial-budaya masyarakat. Kurikulum tidak hanya ditentukan oleh nilai, adat istiadat, dan aspirasi masyarakat tetapi juga harus memperhatikan berbagai aspek kebudayaan seperti struktur

keluarga, aktivitas ekonomi, dinamika politik, sistem pendidikan, dan lain sebagainya.

- b. Mengingat dinamika yang terus berubah dalam kondisi sosial-budaya, kurikulum perlu dirancang dengan fleksibilitas dan dinamisme agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu perubahan dan revisi kurikulum secara berkala harus dilakukan sesuai dengan perkembangan dan perubahan sosial-budaya yang terjadi.
- c. Program kurikulum harus mengintegrasikan materi sosial-budaya dalam masyarakat sebagai bagian penting dari pembelajaran. Tujuan bukan hanya untuk memasyarakatkan siswa tetapi juga untuk melestarikan kekayaan budaya. Perkembangan teknologi juga harus dimanfaatkan sebagai alat penyampaian yang efektif untuk memperkenalkan inovasi kepada siswa, sehingga mereka siap menghadapi perkembangan teknologi di masa depan. Dengan demikian sekolah dapat berperan sebagai agen modernisasi yang efektif.

### 3. Solusi mengatasi Pemerataan Pendidikan

Kurangnya pemerataan pendidikan di Indonesia adalah sebuah tantangan yang tidak bisa diabaikan. Namun dengan komitmen yang kuat dan tindakan nyata dari pemerintah masyarakat dan semua *stakeholder* terkait masalah ini dapat diatasi. Setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa terpengaruh oleh faktor geografis, ekonomi, atau sosial. Solusi yang bisa di implementasikan di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan gedung dan fasilitas sekolah di daerah tertinggal lebih diperhatikan. Setiap pejabat negara memiliki kewenangan dalam mengelola keuangan negara dan merupakan suatu tata

mengenai tujuh program peningkatan kualitas guru yang akan dilaksanakan di tahun ajaran 2023/2024. Program yang sudah ditentukan tersebut disusun sesuai prioritas pemenuhan kebutuhan dan waktu pelaksanaannya. Di tahapan formulasi kebijakan, agenda program yang sudah disusun sudah mengakomodir usulan-usulan dari dari berbagai pihak yang berkepentingan, baik itu dari guru yang akan merasakan manfaat langsung dari program tersebut, maupun dari pengurus sekolah atau dari pihak yayasan yang mendukung dalam pemenuhan dana dan fasilitas terlaksananya program.

Program-program yang telah direncanakan tersebut bisa dilaksanakan oleh Kepala Sekolah. Hasilnya tentu ada yang mencapai target dan ada yang tidak. Dari hasil tersebut Kepala Sekolah melakukan penilaian kebijakan yang sudah diimplementasikannya. Dari proses penilaian tersebut menghasilkan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh kepala sekolah, yaitu:

1. Coaching (kepsek-guru/guru-guru)
2. Latihan tambahan
3. Variasi kegiatan Kombel
4. Belajar mandiri

Itulah tahapan-tahapan dalam kebijakan yang sudah dilakukan oleh Kepala Sekolah tersebut, khususnya dalam penentuan kebijakan peningkatan kualitas guru ditahun ajaran 2023/2024.

## ***DAFTAR PUSTAKA***

- Adi Nugroho. 2009. *Rekayasa Perangkat Lunak Menggunakan UML Dan Java ANDI*: Yogyakarta
- Afifuddin dan Saebani, Beni Ahmad. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia
- Agustino, L. (2014). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Amini, A., Kesumawaty, S., & Aktar, S. (2021). Analisis Implementasi Supervisi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kompetensi Guru di SMA Negeri 5 Pematangsiantar. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 5(2), 660–667. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v5i2.2174>
- Anderson, R. E. (2008). Implications of the Information and Knowledge Society for Education. In J. Voogt & G. Knezek (Eds.), *International Handbook of Information Technology in Primary and Secondary Education* (pp. 5-22). Springer.
- Apriana, D., Kristiawan, M., & Wahyuddin. (2017). *Kepemimpinan Kepala*
- Arikunto, S. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arwildayanto, Suling, A., Sumar, W.T. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoritis, Eksploratif, dan Aplikatif*. Bandung: Cendekia Press.
- Arwildayanto, A. (2018). *Kebijakan Pendidikan Untuk Membangun Karakter*
- Autor, D. H. (2014). Skills, education, and the rise of earnings inequality among the "other 99 percent". *Science*, 344(6186), 843-851.
- Baedhowi. (2004). *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan*. Ja.
- Banerjee, A., & Duflo, E. (2011). *Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty*. PublicAffairs.

- Barakat, B., & Urdal, H. (2009). *Breaking the Waves? Does Education Mediate the Relationship Between Youth Bulges and Political Violence?* Policy Research Working Paper Series 5114, The World Bank.
- Barro, R. J. (1991). Economic Growth in a Cross Section of Countries. *The Quarterly Journal of Economics*, 106(2), 407-443.
- Basri, H. (2014). *Kepemimpinan Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Becker, G. S. (1964). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. University of Chicago Press.
- Black, P., & Wiliam, D. (1998). Inside the Black Box: Raising Standards Through Classroom Assessment. *Phi Delta Kappan*, 80(2), 139-148.
- Blanden, J., Gregg, P., & Machin, S. (2005). *Intergenerational Mobility in Europe and North America*. Centre for Economic Performance.
- Bloom, D., & Canning, D. (2000). The Health and Wealth of Nations. *Science*, 287(5456), 1207-1209.
- Bloom, N., et al. (2013). Does Management Matter? Evidence from India. *The Quarterly Journal of Economics*, 128(1), 1-51.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.
- Budi Winarno. 2007. *Kebijakan Publik; Teori Dan Proses*, Jakarta: PT. Buku Kita
- Chetty, R., et al. (2014). Where is the Land of Opportunity? The Geography of Intergenerational Mobility in the United States. *The Quarterly Journal of Economics*, 129(4), 1553-1623.
- Collier, P. (2000). *Economic Causes of Civil Conflict and Their Implications for Policy*. World Bank.
- Cutler, D. M., & Lleras-Muney, A. (2006). *Education and Health: Evaluating Theories and Evidence*. National Bureau of Economic Research.

- Danandjaja, J. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Antropologi Indonesia.
- Darling-Hammond, L. (2000). *Teacher Quality and Student Achievement: A Review of State Policy Evidence*. *Education Policy Analysis Archives*, 8(1), 1-44.
- Darmalaksana, W. (2020a). *Cara Menulis Proposal Penelitian*. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Dewi, R. (2016). *Kebijakan pendidikan ditinjau dari segi hukum kebijakan publik*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 58-71.
- Dunn, W. N. (2000). *Public Policy Analysis*. New York: Prentice-Hall, .
- Dunn, William N. 2013. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, cetakan kelima. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press
- Durkheim, E. (1956). *Education and Sociology*. Free Press.
- Fagerlind, I., & Saha, L. J. (1989). *Education and National Development: A Comparative Perspective*. Pergamon.
- Farid Setiawan / Ta'dib: *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 7 No. 1 (2018) 410-424.  
410. *Mengelola Konflik Di Lembaga Pendidikan Islam*
- Fathurrochman, I., Budiman, D. A., Alamsyahril, & Kristiawan, M. (2019).
- Fatonah, F., & Helmy, I. (2021). *Pengaruh Perilaku Kerja Inovatif, Budaya Organisasi, dan Etika Kerja Islam Terhadap Kinerja Guru*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* ....  
<http://journal.stieputrabangsa.ac.id/index.php/jimmba/article/view/954>
- Fattah, N. (2013). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. Continuum.
- Friedrich Carl J. 1963. *Man and His Government*. Newyork: Mc Graw-Hill.
- Gaffar, A. (1997). *Publik Policy: State of The Disipline, Model and Proses*. Yogyakarta: Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada.

- Galston, W. A. (2001). Political Knowledge, Political Engagement, and Civic Education. *Annual Review of Political Science*, 4(1), 217-234.
- Geograf. (2023, November 8). Pengertian Kebijakan Pendidikan: Definisi dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli. Retrieved from <https://geograf.id/jelaskan/pengertian-kebijakan-pendidikan/>:  
<https://geograf.id>
- Gutmann, A. (1987). *Democratic Education*. Princeton University Press.
- Hakim, L. (2016). Pemerataan akses pendidikan bagi rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1-10.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan publik*. Semarang: Widya Karya.
- Hanisy, A. (2013). Konsep dasar analisis kebijakan. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*.
- Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2008). The Role of Cognitive Skills in Economic Development. *Journal of Economic Literature*, 46(3), 607-668.
- Harris, I. M., & Morrison, M. L. (2003). *Peace Education*. McFarland.
- Hasbullah, M. (2015). *Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Haveman, R., & Wolfe, B. (1995). The Determinants of Children's Attainments: A Review of Methods and Findings. *Journal of Economic Literature*, 33(4), 1829-1878.
- Herawati, Susilo, et.al, *Lesson Study Berbasis Sekolah “ Guru Konservatid Menuju Guru Inovatif*, (Malang: Bayumedia Publusing, 2009)
- Imron Ali. 2006. *Kebijakan Pendiikan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara

- Imron, A. (2020). Mengkonstruksi Kesadaran Kritis dalam Pendidikan di Era New Normal: Telaah Perspektif Pedagogi Kritis. repository.iainpare.ac.id. <http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/1707/>
- Islamy, I. (2001). *Seri Policy Analysis*. Malang: Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang.
- Islamy, I. (2002). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Judge, T. A., et al. (2001). The Job Satisfaction-Job Performance Relationship: A Qualitative and Quantitative Review. *Psychological Bulletin*, 127(3), 376-407.
- Junaidi, H. (2016). Sumber, Azas Dan Landasan Pendidikan (Kajian Fungsionalisasi secara makro dan mikro terhadap rumusan kebijakan pendidikan nasional). *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, 84-102.
- Kamars, M. D. (2017). Kebijakan Pendidikan dan Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal ilmiah keislaman*, 63
- Kiwang, A. S., Pandie, D. B., & Gana, F. (2014). Kebijakan Publik dan Efektivitas Organisasi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 31-36.
- Kousky, C. (2016). Impacts of Natural Disasters on Children. *The Future of Children*, 26(1), 73-92.
- Kristiawan, M., Safitri, D., & Lestari, R. (2017). *Manajemen Pendidikan*.
- Kusumanegara, Solahuddin, 2010. *Model Dan Aktor Dalam Proses Kebijakan. Publik*, Edisi Pertama, Gava Media, Yogyakarta.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Sage Publications.
- Mairina, V. (2021). Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan. *IICET*, 67-68.
- Majdid, D. A. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Manajemen Kualitas Produk dan Distribusi . Raymond Christian Kawet, Frangky J PAAT, 2022. CV Mineral Mutiara Bumi

- Mankiw, N. G., Romer, D., & Weil, D. N. (1992). A Contribution to the Empirics of Economic Growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 107(2), 407-437.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhibbin Syah, (2000). *Psikologi pendidikan dengan pendekatan baru, Edisi revisi*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Mukhtar. 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Referensi (GP Press Group)
- Mulyono, M. (2019). *Implementasi Kebijakan Pendidikan di Sekolah Menengah*
- Murtasidin, B., & Sigalingging, B. M. (2020). Dimensi Politik Ekologi Dalam Kerjasama Voluntary Partnership Agreement (VPA) Indonesia-Uni Eropa. *Jdp (Jurnal Dinamika ....*  
<http://jurnal.univrab.ac.id/index.php/jdp/article/view/1167>
- Nasarudin, T. M. (2016). Asas dan Norma Hukum Administrasi Negara Dalam Pembuatan Instrumen Pemerintahan. *Jurnal Hukum Novelty*, 139-154.
- Niemi, R. G., & Junn, J. (1998). *Civic Education: What Makes Students Learn*. Yale University Press.
- Nurdin, Syafruddin & Usman, Basyirudin, 2003. *Guru profesional dan implementasi kurikulum*, Jakarta: Ciputat Pers.
- Nurhadi, Muljani A. (2001). "Pendidikan Sebagai Investasi: Isu dan Tantangannya." *Didaktika*. Vol. 1 No. 1, Agustus 2001, pp.87-94.
- OECD. (2010). *The High Cost of Low Educational Performance: The Long-run Economic Impact of Improving PISA Outcomes*.
- OECD. (2012). *Equity and Quality in Education: Supporting Disadvantaged Students and Schools*.

- OECD. (2016). *Education at a Glance 2016: OECD Indicators*. OECD Publishing.
- Oreopoulos, P., & Salvanes, K. G. (2011). Priceless: The Nonpecuniary Benefits of Schooling. *Journal of Economic Perspectives*, 25(1), 159-184.
- Parsons, Wayne. 2005. *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Brenada Media
- Psacharopoulos, G., & Patrinos, H. A. (2004). Returns to Investment in Education: A Further Update. *Education Economics*, 12(2), 111-134.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. Simon and Schuster.
- Ramhdani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1-12.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2010. *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta
- Reardon, S. F. (2011). The Widening Academic Achievement Gap Between the Rich and the Poor: New Evidence and Possible Explanations. In G. Duncan & R. Murnane (Eds.), *Whither Opportunity? Rising Inequality and the Uncertain Life Chances of Low-Income Children* (pp. 91-116). Russell Sage Foundation.
- RI, U. (2007). *RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL*. Jakarta.
- Risnawan, W. (2017). Peran dan Fungsi Infrastruktur Politik dalam Pembentukan Kebijakan Publik. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 511-518.
- Rogers, C. R. (1969). *Freedom to Learn*. Merrill.

- Roihanah, R., Setiawan, F., Setianto, E., & Istinganah, I. (2022). Legitimasi dan Komunikasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Education and Development*, 10(3), 94–99.
- Romer, P. M. (1990). Endogenous Technological Change. *Journal of Political Economy*, 98(5), S71-S102.
- Rusdiana, (2015) *Kebijakan Pendidikan dari Filosofi ke Implementasi Bandung*, Pustaka Setia
- Sari, M. (2016). Analisis Kebijakan Pendidikan Menengah di Indonesia. *Jurnal*
- Schultz, T. W. (1961). Investment in Human Capital. *The American Economic Review*, 51(1), 1-17.
- Siswanto, E., & Hidayati, L. (2021). Pengembangan Kebijakan Pendidikan Dalam Tinjauan Polkumeksosbud. [books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=c78-EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA48&dq=relasi+antara+pendidikan+dengan+dimensi+politik+ekonomi+dan+sosial&ots=D\\_3B\\_Gx32v&sig=tyEeCIUAqD1RFuf rwZkQqAiw85g](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=c78-EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA48&dq=relasi+antara+pendidikan+dengan+dimensi+politik+ekonomi+dan+sosial&ots=D_3B_Gx32v&sig=tyEeCIUAqD1RFuf rwZkQqAiw85g)
- Skinner, B. F. (1953). *Science and Human Behavior*. Macmillan.
- Soenarko. (1998). *Kebijakan Publik, Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*. Surabaya: CV. Papyrus.
- Suharno, S. (2017). *Kebijakan Pendidikan di Tingkat Satuan Pendidikan*
- Suharno. (2008). *Prinsip-Prinsip Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Supardi. (2015). *Penilaian Autentik Pembelajaran Afektif, Kognitif, Psikomotor*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tawa, Angelika Bule. 2019. “Kebijakan Pendidikan Nasional Dan Implementasinya Pada Sekola Dasar.” *SAPA - Jurnal Kateketik Dan Pastoral* 4(2):107–17. doi: 10.53544/sapa.v4i2.82.

- Tilaar, H. A., & Nugroho, R. (2016). Kebijakan Pendidikan Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tilbury, D. (2011). Education for Sustainable Development: An Expert Review of Processes and Learning. UNESCO.
- Tohani, E. (2020). Hubungan Dialektis Pendidikan dan Pembangunan. books.google.com.  
[https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=KfoOEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA23&dq=relasi+antara+pendidikan+dengan+dimensi+politik+ekonomi+dan+sosial&ots=a0mVil5URF&sig=iWhPcY7tZwP1fD\\_PyOiFTS5m9-k](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=KfoOEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA23&dq=relasi+antara+pendidikan+dengan+dimensi+politik+ekonomi+dan+sosial&ots=a0mVil5URF&sig=iWhPcY7tZwP1fD_PyOiFTS5m9-k)
- Torjman, S. (2005). What is Policy? Ottawa: Ontario: the Caledon Institute of Social Policy.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003. 2003. “Sistem Pendidikan Nasional.” 4(1):147–73.
- undang-undang. 1945. “UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA.” 105(3):129–33.
- UNESCO. (2014). Teaching and Learning: Achieving Quality for All. EFA Global Monitoring Report 2013/4.
- UNESCO. (2015). Education for All 2000-2015: Achievements and Challenges. EFA Global Monitoring Report 2015.
- UNESCO. (2017). Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives.
- UNESCO. (2020). The Right to Education: Law and Policy Review Guidelines. Paris: UNESCO.
- UNICEF. (2017). Narrowing the Gaps: The Power of Investing in the Poorest Children.

- Unterhalter, E. (2005). Global Inequality, Capabilities, Social Justice: The Millennium Development Goal for Gender Equality in Education. *International Journal of Educational Development*, 25(2), 111-122.
- Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). *Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics*. Harvard University Press.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.
- Wibowo. 2007. *Manajemen Perubahan*. Jakarta: Raja Grafindo. Persada. Sultan Djasmi
- Wijayanti, R. M., & Wardani, N. S. (2018). *Kebijakan Pendidikan dan*
- World Bank. (2018). *World Development Report 2018: Learning to Realize Education's Promise*. World Bank Publications.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor



**FILOMEDIA** akan terus bertransformasi menjadi Penerbit Unggulan dengan pelayanan cepat dan memuaskan.

**FILOMEDIA PUBLISHER** yang kini telah berganti nama menjadi **PENERBIT FILOMEDIA PUSTAKA** selalu terdepan menerima serta menerbitkan naskah semua penulis. Dengan layanan cepat dan memuaskan. Serta selalu bertransformasi untuk “Terdepan Mengapresiasi Karya Penulis”